

ABSTRAK
PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DI ERA DESENTRALISASI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN
LAMPUNG BARAT

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran yang dilaksanakan dengan program keluarga berencana sejak era desentralisasi kewenangan wajib pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan perbedaan pelaksanaan di setiap daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil-hasil pelaksanaan program KB di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan program KB di kabupaten Lampung Tengah di bandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan pembentukan Kelembagaan yang menanggapi program KB di Kabuapten Lampung Tengah sudah sajak awal otonomi berbentuk Badan lain halnya dengan di kabupaten Lampung Barat berbentuk Badan baru pada tahun 2010 yang sebelumnya berbentuk Kantor. 2) Setiap Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Lampung Tengah rata-rata menangani 2-3 desa sementara, di Lampung Barat setiap PLKB rata-rata menangani 7-8 desa 3).Angka kelahiran di Kabupaten Lampung Tengah adalah 2,5 kelahiran per wanita usia subur dan kesertaan ber KB sebanyak 64,4 % dari Pasangan Usia Subur. Hal ini merupakan hasil dari suatu proses yang dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten, sehingga kesertaan ber-KB ini berdampak pada penurunnya angka kelahiran. Angka Kelahiran di kabupaten Lampung Barat adalah 2,78 kelahiran per wanita usia subur dengan kesertaan ber-KB 67,6 %. Kesertaan ber KB di Kabupaten Lampung Barat yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Tengah, kurang memberi kontribusi

terhadap angka kelahiran di Lampung Barat, salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah peserta KB yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebagian besar menggunakan Suntik (65,9 %) dan pil 20,1%. Dari Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi.

Hal yang disarankan adalah lembaga yang menangani program KB untuk terus fokus dalam penggarapan program KB dan melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas penggarapan serta PLKB sebagai ujung tombak penggarapan program KB terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kata kunci: Desentralisasi dan Kebijakan